

REFLEKSI TENTANG KEKERASAN PEMBANGUNAN: MENUJU PEMBANGUNAN PERSPEKTIF HAM

Oleh: Lambang Trijono*

Terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda negara-negara sedang berkembang pada akhir tahun 1990-an ini telah semakin mempertegas kebenaran pendapat para pengiritik model arus utama pembangunan (*mainstream models of development*) bahwa pembangunan berorientasi pasar (kapitalis) dan negara (sosialis) tidak bisa menjawab permasalahan sosial-ekonomi negara sedang berkembang. Mereka, para pengiritik yang dikenal dengan pemikir aliran pembangunan alternatif (*alternative development*), yang datang dari berbagai arus pemikiran itu, telah lama menyuarakan kritik bahwa baik model pembangunan ala kapitalis dan sosialis tidak mampu membawa kemajuan negara sedang berkembang menjadi sejajar dengan negara-negara industri maju. Justru sebaliknya, kedua model pembangunan tersebut telah menciptakan ketergantungan, keterbelakangan, kerentanan, dan pergolakan sosial-politik terus menerus di negara bersangkutan. Hal itu dibuktikan oleh kenyataan bahwa begitu negara sedang berkembang dilanda krisis ekonomi, hal itu dengan cepat menimbulkan pergolakan sosial-politik serius sehingga semakin terperosok masuk ke dalam jajaran negara-negara yang semakin terbelakang.

Kenyataan demikian dapat kita lihat di Indonesia sekarang. Sejak krisis ekonomi, tepatnya krisis moneter, melanda Indonesia sekitar bulan Juli 1997, tiba-tiba perekonomian Indonesia menjadi sangat buruk dan pergolakan sosial-politik muncul di sana-sini. Pada saat itu hampir tidak ada pengamat yang memperkirakan keadaan menjadi sedemikian buruk seperti sekarang. Bahkan di kalangan ekonom dan teknokrat banyak yang berfikir optimis bahwa krisis

* Staf pengajar jurusan Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

akan segera bisa diatasi. Banyak ekonom mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita kuat, lebih kuat dari Thailand dan Korea Selatan, sehingga krisis ekonomi bisa segera dipulihkan. Fundamental ekonomi yang mereka maksud adalah menunjuk pada indikator-indikator ekonomi neo-klasik, seperti angka pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, keseimbangan anggaran negara, stok keuangan negara, yang semua itu masih menunjukkan angka moderat sehingga dipandang tidak membahayakan. Tetapi, ternyata indikator dan angka itu tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Ekonomi Indonesia ternyata semakin memburuk, pergolakan sosial-politik yang mengikutinya tidak bisa dielakkan, yang akhirnya memuncak pada rontoknya negara dan rejim Orde Baru karena ketidakmampuannya mengatasi gelombang krisis yang demikian dahsyat itu.

Kenyataan ini mendorong kita untuk kembali menengok pada model pembangunan alternatif (*alternative development*). Kita, kalangan pemikir sosial termasuk teknokrat dan ekonom, tampaknya semakin menyadari bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa lagi dipandang sebagai "*deus ex machina*", kunci ajaib yang dapat dipakai untuk membuka semua pintu, pintu kemajuan masyarakat. Krisis ekonomi itu menyadarkan kita bahwa pembangunan ekonomi bukan satu-satunya kunci, tetapi masih banyak diperlukan kunci-kunci lain untuk membuka kemajuan masyarakat, seperti pembangunan politik, sosial, dan kebudayaan. Kelalaian kita pada pembangunan politik, sosial, dan kebudayaan, dan tekanan kita yang berlebihan pada pembangunan ekonomi, telah menyebabkan sistem politik dan sosial kita sangat rapuh untuk menghantarkan kita pada kemajuan ekonomi yang kita cita-citakan. Begitu dihantam badai krisis ekonomi maka sistem politik kita menjadi begitu kedodoran mengatasinya, bahkan mudah rontok sehingga timbul pergolakan sosial-politik yang hebat, yang akhirnya semakin memperparah keadaan.

Tulisan ini merupakan refleksi tentang kekerasan pembangunan yang berlangsung di dunia kita selama ini dari sudut perspektif pembangunan alternatif, khususnya varian perspektif perdamaian (*peace development*)¹ atau pembangunan tanpa kekerasan (*non-violence development*)¹. Perspektif ini

¹ Dalam klasifikasi Bjorn Hettne, perspektif pembangunan ini termasuk dalam pendekatan normatif, yang bisa dibedakan dari pendekatan positivistik dalam hal pandangannya terhadap perubahan sosial. Pandangan positivistik pada dasarnya hanya ingin menjelaskan perubahan yang terjadi, sementara pendekatan normatif justru ingin mengubah keadaan itu sendiri. Lihat, Bjorn Hettne, "Peace and Development: Contradictions and Compatibilities". *Journal of Peace Research*, Vol. 20, No.4, 1983.

melihat terpenuhinya kebutuhan pokok akan kedamaian hidup atau hidup tanpa kekerasan (*peace*) dan bebas dari ketakutan (*security*) sebagai esensi penting pembangunan.

Terdapat beberapa alasan mengapa perspektif ini dipilih. *Pertama*, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa praktek pembangunan yang bertumpu pada model pembangunan arus utama (*mainstreams*) telah gagal sebagai agen "pembawa kemajuan" sehubungan dengan banyaknya resiko (*risks*) pembangunan yang ditimbulkannya, yang justru menimbulkan keterbelakangan dan kemunduran. Salah satu contohnya adalah banyaknya kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung, yang ditimbulkan oleh praktek pembangunan model ini sehingga bukan perkembangan atau kemajuan masyarakat yang dicapai, tetapi justru kekerasan yang menghambat perkembangan potensi sumber daya manusia.

Kedua, sejak krisis ekonomi dan pergolakan sosial-politik melanda tanah air awal tahun 1998 ini, telah muncul semacam kesadaran meluas di kalangan masyarakat akan arti pentingnya rasa aman, hidup damai tanpa kekerasan. Sejak krisis ekonomi menghantam Indonesia akhir tahun 1997, telah muncul berbagai pergolakan sosial-politik, konflik kekerasan, kerusuhan massa, yang datang bertubi-tubi dan begitu melelahkan. Sadar atau tidak, munculnya berbagai kekerasan kolektif itu mendorong anggota masyarakat mencari solusi untuk resolusi dan rekonsiliasi guna mengatasi keadaan. Perspektif pembangunan tanpa kekerasan ini merupakan salah satu solusi jangka panjang yang ingin diajukan di sini untuk menjawab permintaan masyarakat itu, sekaligus untuk meletakkan landasan bagi pembangunan Indonesia pasca-krisis.

Ketiga, tinjauan atas praktek pembangunan dari sudut perspektif pembangunan tanpa kekerasan di sini diajukan untuk merangsang tumbuhnya wacana publik tentang pembangunan alternatif di Indonesia. Kita mengenal banyak alternatif yang ditawarkan dalam perspektif pembangunan alternatif. Pembangunan dalam perspektif perdamaian hanyalah salah satu di antaranya. Di hadapan pada semakin tidak menentunya arah perkembangan sosial-ekonomi-politik global saat ini, tumbuhnya wacana publik tentang pembangunan alternatif di Indonesia bisa menjadi sumber daya ketahanan tersendiri untuk memupuk kesiapan kita menghadapi krisis dan tantangan perubahan global yang tidak menentu itu. Krisis ekonomi kemarin merupakan

contoh nyata di mana begitu sedikit saja kita dihantam oleh krisis ekonomi regional ASEAN, kita menjadi ikut terpengaruh, bahkan menyeret kita pada krisis sosial-politik berkepanjangan. Dengan wacana publik yang luas akan arti pentingnya pembangunan alternatif kita akan lebih siap mengkritisi arus utama pembangunan yang sedang berlangsung, sekaligus memilih alternatif pembangunan yang cocok ketika kita berada dalam masa krisis. Hal itu akan mudah dilakukan bila telah ada stok pengetahuan tentangnya dalam wacana publik kita.

Kekerasan Pembangunan

Sejak lama telah muncul kesadaran kritis di kalangan pemikir pembangunan dalam perspektif perdamaian bahwa model pembangunan arus utama yang berpusat pada pasar (kapitalis) dan negara (sosialis), di dalam dirinya mengandung kontradiksi-kontradiksi dan konflik-konflik yang bisa menyemaikan terjadinya konflik kekerasan di masyarakat. Sorensen menyebut kontradiksi dan konflik demikian dengan konsep yang sangat unik, yaitu apa yang disebut dengan “kekerasan pembangunan” (*developmental violence*)². Konsep ini dikatakan unik karena di dalam konsep itu sendiri terkandung adanya kontradiksi istilah. Pembangunan umumnya dipahami sebagai proses kemajuan. Sementara, kekerasan secara umum dipahami sebagai segala hal yang menghambat realisasi perkembangan potensi manusia atau menghambat kemajuan. Penggabungan kedua konsep itu dalam istilah “kekerasan pembangunan” mengandung makna bahwa di dalam pembangunan terdapat potensi dan kecenderungan terjadinya kekerasan yang justru menghambat pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat paradoks kekerasan dalam setiap praktek pembangunan. Pemahaman atas paradoks tersebut tentu saja sangat tergantung pada perspektif yang kita gunakan, karena konsep pembangunan itu sendiri merupakan konsep yang masih ramai diperdebatkan.

² Georg, Sorensen, “Contradictions in a Rich Concept of Development: Problems of Welfare and the Quality of Life”. *Bulletin of Peace Proposal*, Vol. 18, No. 1, 1987.

Kemunculan konsep 'kekerasan pembangunan' semula dirangsang oleh pemikiran Hettne tentang pembangunan dan perdamaian, yang kemudian digunakan oleh Sorensen untuk mengkritik pandangan Galtung tentang pembangunan yang dinilainya sangat positivistik. Hettne berpendapat bahwa pembangunan, dalam pengertian konvensional sebagaimana diterapkan model pembangunan kapitalis dan sosialis, cenderung melayani kepentingan kelompok berkuasa daripada rakyat kebanyakan. Oleh karena itu, proses pembangunan harus dipelihara dengan kekuatan militer, atau dalam bentuknya yang lebih moderat dengan kekerasan, tergantung pada seberapa besar surplus ekonomi yang bisa diberikan untuk kesejahteraan warganya³. Untuk memelihara struktur koersif demikian, pembangunan dan pembentukan surplus ekonomi tetap diperlukan. Dan itu berarti akan menciptakan kembali struktur yang lebih koersif. Dalam kecenderungan demikian, kontradiksi, ketegangan, dan konflik kekerasan menjadi sulit dihindarkan dalam model pembangunan kapitalis dan sosialis.

Untuk keluar dari lingkaran konflik ini, Hettne mengajukan model pembangunan alternatif menuju masyarakat damai tanpa kekerasan, baik langsung maupun struktural (*positive peace*). Karena banyaknya alternatif dalam pembangunan alternatif itu, Hettne menyebutnya dengan arus pembangunan yang lain selain arus utama (*another development*). Ciri-ciri dari arus pembangunan yang lain itu secara umum adalah: (1) berorientasi pada kebutuhan (*need-oriented*); (2) bersifat dari dalam/pribumi atau tidak asing bagi masyarakat bersangkutan (*endogenous*); (3) mandiri (*self-reliant*); (3) bernuansa menghargai lingkungan (*ecologically sound*); (4) berdasar pada transformasi struktural (*based on structural transformation*).⁴

Salah satu perspektif pembangunan yang mempunyai ciri-ciri di atas adalah perspektif pembangunan tanpa kekerasan, baik kekerasan langsung maupun struktural (*positive peace development*). Termasuk di sini adalah konsep pembangunan yang terkenal dari ahli perdamaian, Johan Galtung. Menurut Galtung, pembangunan haruslah mencakup tujuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik material maupun spiritual. Di dalamnya harus pula mencakup empat macam kebutuhan dasar manusia, yaitu kesejahteraan sosial-

³ Hettne, *op. cit.*, 1983.

⁴ Hettne, *op. cit.*, 1983.

ekonomi (*welfare*), keamanan (*security*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*). Pemenuhan empat kebutuhan dasar ini, bagi Galtung, merupakan suatu keharusan, karena hanya dengan cara itu manusia akan menemukan pembangunan atau kemajuan yang sebenarnya, yaitu terbebas dari belenggu empat jenis kekerasan akut di masyarakat: kemiskinan (*poverty*), perusakan alam maupun sumber daya manusia (*destruction*), tekanan (*repression*), dan alienasi (*alienation*)⁵.

Tetapi, realisasi model pembangunan yang demikian itu bukannya tanpa masalah. Soerensen berpendapat bahwa konsep pembangunan dari Galtung ini masih bersifat positivistik dan terjebak dalam dilema pembangunan di atas. Pembangunan dalam arti upaya pembebasan kekerasan sangatlah sulit dipraktikkan, karena, menurut Soerensen, justru dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar itu masih ditemui adanya paradoks dan kontradiksi satu sama lain. Hal itu masih menghasilkan kekerasan pembangunan (*developmental violence*), sebagaimana dikemukakan di muka. Kontradiksi itu dengan mudah dapat dilihat, misalnya, antara pemenuhan kesejahteraan ekonomi dengan kebutuhan dasar lainnya. Ketika pemenuhan kebutuhan kesejahteraan ekonomi dikejar dengan upaya peningkatan produksi, konsumsi, dan surplus produksi sebanyak-banyaknya, hal itu dapat menimbulkan kekerasan berupa kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, alienasi, konflik kelas, dan dominasi dengan cara kekerasan. Hal ini berarti pembangunan kesejahteraan ekonomi di dalam dirinya dapat mengancam pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, yaitu terpenuhinya rasa aman (*security*) warga masyarakat.

Kontradiksi juga dapat kita temukan antara pemenuhan kebutuhan keamanan dengan kebutuhan dasar lainnya. Secara umum, untuk menopang pertumbuhan ekonomi, melindungi struktur ekonomi yang timpang, dan mengatasi konflik di masyarakat, sengaja dibangun sarana keamanan yang kuat untuk menjaga stabilitas. Biasanya untuk memelihara stabilitas dan keamanan dilakukan dengan membangun keamanan dalam arti sempit, yaitu dengan mengembangkan teknologi militer, angkatan bersenjata, dan birokrasi yang kuat. Tetapi, upaya demikian justru mengancam pemenuhan kebutuhan lainnya, yaitu kebebasan (*freedom*). Karena, dalam kenyataannya militer dan birokrasi yang kuat seringkali justru digunakan oleh penguasa atau elit politik-

⁵ Galtung, *op. cit.*, 1980.

ekonomi untuk menekan warga negara mereka sendiri. Sehingga, ketika pembangunan stabilitas politik dipahami secara sempit hanya dengan pengembangan sarana militer, hal itu justru bisa kontra-produktif terhadap terpenuhinya kebebasan dan hak politik warga negara. Kontradiksi demikian juga kita temukan antara upaya pembangunan dengan terjadinya alienasi dalam masyarakat karena konsentrasi surplus ekonomi, kekuasaan, dan terbentuknya mega-struktur sosial-politik-ekonomi-teknologi akibat pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi⁶.

Pandangan Hettne, Galtung, dan Sorensen ini sangat relevan untuk menyoroti krisis pembangunan dewasa ini. Mengikuti pandangan Sorensen di atas, kita menemukan bahwa krisis pembangunan dewasa ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari kontradiksi-kontradiksi di dalam praktek pembangunan, terutama ditandai dengan munculnya kekerasan pembangunan sebagai akibat dari proses pembangunan itu sendiri. Pandangan Sorensen mengingatkan kita bahwa di dalam praktek pembangunan selalu ada dimensi-dimensi kekerasan yang harus diperhitungkan. Sejauhmana dan apakah suatu pembangunan berhasil atau tidak, hal itu harus diperhitungkan dimensi-dimensi kekerasan yang ditimbulkan oleh pembangunan bersangkutan.

Dimensi Kekerasan dalam Pembangunan

Banyak analisis tentang pembangunan selama ini mengabaikan dimensi kekerasan di dalamnya. Padahal dimensi ini sangat penting diperhitungkan karena hal itu sangat menentukan untuk menilai sejauhmana praktek pembangunan dikatakan sukses, atau mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, atautkah gagal, dalam arti menghambat pencapaian kebutuhan hidup tersebut. Kita menemukan bahwa dalam model pembangunan ala kapitalisme, yang sekarang populer dengan kebangkitan kembali ekonomi

⁶ Lihat diskusi intensif tentang ini dalam Sorensen, Georg, "Contradictions in Rich Concept of Development, Problems of Welfare and the Quality of Life". *Op.Cit.*; Georg Sorensen, "Peace and Development: Looking for the Right Track". *Journal of Peace Research*, Vol. 22, No 1, 1985; Georg Sorensen, "Utopianism in Peace Research: the Gandhian Heritage". *Journal of Peace Research*, Vol. 29, No. 2, 1992.

neo-liberal di dunai barat, ternyata tidak mempertimbangkan sama sekali dimensi kekerasan dan persoalan terpenuhi tidaknya kebutuhan dasar dan hak asasi untuk realisasi pengembangan kapasitas manusia. Demikian pula dengan model pembangunan ala sosialis, ternyata telah menciptakan dominasi, represi dan korban kekerasan yang tak terhitung besarnya.

Kekerasan pembangunan yang ditimbulkan kedua oleh model itu dapat mengambil bentuk kekerasan langsung (*direct violence*) dan kekerasan tidak langsung (*indirect violence*). Termasuk dalam kekerasan langsung adalah segala macam akibat pembangunan yang menyebabkan terjadinya pembunuhan, koersi, dan tindakan brutal melukai orang sehingga menderita sakit fisik dan psikis. Sementara, kekerasan tidak langsung adalah segala macam jenis kekerasan struktural dan kultural (*structural and cultural violence*) yang disebabkan oleh praktek pembangunan. Termasuk yang terakhir adalah kekerasan karena mengabaikan hak warga negara, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, represi, alienasi, prasangka, diskriminasi, rasisme, dan sebagainya⁷.

Semua bentuk kekerasan ini pada dasarnya mengancam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Karena itu, dalam pengertian ini kekerasan dalam arti luas dapat dipandang sebagai semua bentuk penghambat pemenuhan kebutuhan dasar manusia⁸. Termasuk di sini adalah kebutuhan dasar untuk hidup dan bertahan hidup, terpenuhi kesejahteraan sosial-ekonomi, kebebasan, dan untuk mengembangkan identitas kultural yang bermakna bagi hidupnya. Terpenuhinya kebutuhan dasar ini pada dasarnya merupakan hak dari setiap orang dan warga negara. Karena itu dapat dikatakan lebih lanjut bahwa kekerasan dalam arti luas merupakan semua jenis tindakan, yang sebenarnya bisa dicegah, telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia atau yang menghambat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia⁹. Pengertian ini mengandung konsekuensi bahwa setiap pemenuhan kebutuhan dasar manusia berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dijamin oleh sistem politik dan hukum.

⁷ Galtung, *op. cit.*, 1975.

⁸ Galtung, *op. cit.*, 1980.

⁹ Tentang definisi kekerasan yang melihat dari sisi terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia lihat Jamil Salmi, *Violence & Democratic Society, New Approaches to Human Right*. London: Zed Books, 1993.

Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak asasi manusia semacam itu ternyata selama ini diabaikan oleh model pembangunan kapitalis neo-liberal maupun sosialis. Banyak kritik dilontarkan kepada kedua model pembangunan ini yang mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia.

Kritik terhadap model kapitalis neo-liberal terutama dilontarkan sehubungan dengan kesalahan asumsinya terhadap bekerjanya sistem pasar bebas. Bagi pembangunan model kapitalis neo-liberal, tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan produksi material sebanyak-banyaknya. Bekerjanya pasar bebas yang secara diyakini merupakan satu-satunya pendorong pembangunan. Banyak ahli mempersoalkan bahwa pikiran demikian akan menimbulkan masalah dan menciptakan resiko sosial (*social risks*) daripada memberikan jaminan kesejahteraan hidup.

Dalam banyak kasus, penerapan model pasar bebas dari kapitalisme global telah menimbulkan kekerasan pembangunan di negara sedang berkembang. Adopsi pasar bebas oleh negara sedang berkembang seringkali diikuti oleh pengurangan peran negara dan institusi sosial-kultural lain dalam menopang kehidupan ekonomi. Padahal institusi-institusi ini sangat penting menopang ekonomi masyarakat di negara sedang berkembang¹⁰. Sesudah itu, pengurangan peran negara dan institusi sosial kultural dalam ekonomi ini ternyata digantikan oleh dominasi korporasi perusahaan nasional dan multinasional yang sulit dikendalikan. Sehingga, penetrasi pasar dan kapital asing sulit dihindari telah menghancurkan lembaga-lembaga sosial-ekonomi-politik lokal yang menjadi basis kompetisi masyarakat negara sedang berkembang¹¹. Pengurangan peran seperti ini akan menjadikan masyarakat kehilangan basis sumber ekonominya, sebuah kondisi yang dengan mudah memicu munculnya konflik kekerasan di masyarakat, seperti protes dan kerusuhan sosial¹².

¹⁰ John Brohman, "Economism and Critical Silence in Development Studies: a Theoretical Critique of Neo-liberalism". *Third World Quarterly*. Vol. 16, No. 2, 1995.

¹¹ Ted Wheelwright, "Economic Control for Social Ends", dalam Stuart Rees et al., *Beyond the Market. Alternatives to Economic Rationalism*. Sydney: Pluto Press, 1994.

¹² Akibat pengurangan peran negara yang menimbulkan kekerasan politik, lihat Henry S. Bienen and Mark Gersovitz, "Consumer Subsidy Cut, Violence, and Political Stability". *Comparative Politics*, Vol. 19, No. 1, 1986.

Berkembangnya rasionalisme ekonomi yang dipacu perkembangannya oleh sistem kapitalisme atau pasar bebas itu tanpa banyak disadari ternyata juga telah menimbulkan kekerasan kultural di masyarakat. Di negara maju, hal itu mendorong berkembangnya sikap hidup materialisme, hedonisme, kehancuran mental, ketergantungan pada alkohol dan narkoba, kekosongan makna hidup, kriminalitas, pembunuhan di jalan, dan sebagainya. Di negara sedang berkembang, hal itu ditandai oleh berkembangnya kesenjangan sosial-ekonomi, konflik antara kelas dan etnik, dan bangkitnya fundamentalisme agama¹³.

Pasar bebas juga telah menghancurkan sumber daya alam yang digunakan oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Pasar bebas yang mendasarkan sistem operasinya pada kepentingan agen ekonomi, cenderung mengambil kepentingan kolektif komunitas yang bersumber dari lingkungan hidup. Karena itu, keberlanjutan sumber daya alam untuk menopang kehidupan kolektif cenderung terancam. Pasar bebas juga menghancurkan landasan sosial-kultural untuk konservasi sumber daya alam, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh suku-suku minoritas setempat. Dengan beralihnya ekonomi di tangan korporasi perusahaan nasional dan asing, lingkungan hidup yang sangat penting menopang kehidupan suku-suku minoritas jadi terancam rusak. Eksploitasi pasar bebas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar-besarnya secara langsung juga merusak alam dan lingkungan hidup. Selain lingkungan hidup rusak karena eksploitasi, dampak kerusakan yang ditimbulkannya tidak pernah dihitung sebagai biaya produksi. Hal itu bisa menciptakan kemajuan semu dalam pembangunan, karena terdapat banyak resiko dan kerusakan lingkungan yang merugikan komunitas sekitar dan generasi yang akan datang tidak diperhitungkan dalam praktek pembangunan¹⁴.

Ekspansi kapitalisme dewasa ini juga dikhawatirkan akan memacu perlombaan senjata, perang antar negara, pengembangan militerisme, dan konflik kekerasan lainnya di negara sedang berkembang. Ekspansi dan mobilitas kapital dari negara maju ke negara sedang berkembang akan menimbulkan ketercerabutan lembaga-lembaga ekonomi dari konteks sosial-politiknya. Ekspansi kapital internasional ke negara sedang berkembang akan

¹³ Salmi, *op. cit.*, 1993.

¹⁴ Brohman, *op. cit.*, 1995; Wheelwright, *op. cit.*, 1994.

menumbuhkan korporatisme ekonomi di negara sedang berkembang tersebut. Seperti diramalkan Keynes, ekspansi kapital ini akan mendorong konflik politik antar negara. Pada esensinya perusahaan transnasional tidak bertuan. Ia di satu sisi telah tercerabut dari komunitas politik nasional negara asal, namun di sisi lain hidup dalam komunitas politik asing di negara di mana ia tinggal. Dan, bahayanya di tengah tiadanya perlindungan politik itu, di dalam sistem politik internasional tidak ada satu pemerintahan global pun yang melindunginya. Selain itu, ekspansi kapital juga berarti diikuti oleh mobilitas tenaga kerja. Kapital akan berpindah menuju daerah yang memiliki tenaga kerja murah, yaitu di negara sedang berkembang. Sebaliknya, buruh yang murah cenderung bergerak ke daerah dimana terdapat konsentrasi kapital, yaitu di negara kapitalis maju. Gerak mobilitas tenaga kerja murah ini cenderung akan meratakan upah tenaga kerja. Hal itu cenderung menimbulkan krisis ekonomi global dan mendorong konflik antar negara. Hal ini jauh sebelumnya telah diingatkan Keynes, bahwa pasar bebas, mobilitas kapital dan tenaga kerja antar negara secara bebas akan mendorong ketegangan dan konflik antar negara, perlombaan senjata dan militerisme, dan mendorong perang daripada menciptakan perdamaian¹⁵.

Kritik kita terhadap model pembangunan kapitalis demikian, bukan berarti bahwa kita sepakat dengan model sosialis dan tanpa kritik terhadapnya. Dari perspektif perdamaian, model pembangunan sosialis juga tak kalah jahatnya telah menimbulkan kekerasan pembangunan yang hebat. Banyak kritik dilontarkan bahwa model pembangunan berpusat pada negara (*state-centered*) ini juga tidak memperhitungkan dimensi kekerasan di dalamnya. Model ini juga tidak menyadari bahwa dalam dirinya juga cenderung mendorong berkembangnya dominasi, penindasan, konflik, revolusi sosial, dan kekerasan politik yang hebat.

Belajar dari pengalaman praktek pembangunan di negara sosialis-komunis, terutama di Uni Soviet dan Eropa Timur, model pembangunan sosialis cenderung menciptakan ekonomi komando yang gampang menimbulkan kekerasan langsung seperti teror, penculikan, pembunuhan, konsentrasi di barak, alienasi dan sebagainya. Karena memusatkan perhatiannya pada pengembangan teknologi besar dan perlombaan senjata, ekonomi komando

¹⁵ Seperti dikutip Wheelwright, *op. cit.*, 1990, hal 30.

cenderung mengabaikan nasib rakyatnya sehingga menghasilkan kekerasan struktural seperti kemiskinan, kelaparan, kolonialisme internal, dan totalitarianisme yang membahayakan kehidupan warga negaranya. Di bekas negara Uni Soviet, misalnya, kekerasan langsung seperti aparat yang berlaku brutal terhadap rakyatnya, penganiayaan atas nama sosialisme, merupakan pemandangan sehari-hari. Seorang pejabat pemerintah anak buah Lenin, Krylenko, misalnya, dengan mudahnya mengatakan: “kita harus menghukum bukan hanya yang bersalah. Penghukuman terhadap orang tidak bersalah akan menundukkan massa lebih banyak”¹⁶. Kekerasan tidak langsung seperti kemiskinan dan kelaparan juga menjadi pemandangan sehari-hari di masyarakat bekas negara Soviet dan Eropa Timur. Ironisnya, kemiskinan dan kelaparan itu berada di tengah-tengah sekitar reaktor nuklir dan kompleks militer yang menghabiskan biaya begitu besar. Kenyataan demikian sekarang ini mulai kita lihat di negara-negara sedang berkembang, seperti yang terjadi di Pakistan dan India. Di tengah kemiskinan rakyatnya, kedua negara itu justru terjebak dalam perlombaan senjata nuklir yang membahayakan warga masyarakatnya.

Jadi, secara singkat, kita bisa mengatakan bahwa baik model kapitalis maupun sosialis terjebak dalam pembangunan yang menyemaikan tumbuh suburnya kekerasan dalam masyarakat, baik kekerasan langsung maupun tidak langsung. Dari sudut pandang perdamaian, dua model pembangunan itu sekarang ini sangat konvensional dan rapuh. Kedua model itu, seperti dikatakan Hettne, terlalu mengandalkan pada pengembangan kekuatan (*force*) daripada moralitas dan kemanusiaan. Di dalam kedua model, pembangunan hanya menguntungkan kalangan elit berkuasa daripada mayoritas masyarakatnya, sehingga terpaksa harus dipelihara dengan tekanan dan kekuatan militer untuk menjaga kepentingan mereka itu. Dari perspektif perdamaian, kedua model itu mirip satu sama lain, yaitu sama-sama elitis dan cenderung menyemaikan kekerasan. Jika orang selama ini melihat kedua model itu sebagai model yang berbeda, perbedaannya pada dasarnya hanyalah dalam arti sarana yang digunakan elit berkuasa, yang satu menggunakan pasar yang lain menggunakan negara. “Sejauh tujuannya yang menjadi perhatian, tidak ada perbedaan berarti antara keduanya”, kata Hettne¹⁷. Ia menambahkan, keduanya cenderung

¹⁶ Seperti dikutip Salmi, *op. cit.*, 1993, hal. 48.

¹⁷ Hettne, *op. cit.*, 1983, hal. 338.

mengarah ke modernitas gaya barat yang cenderung mengambangkan mega-struktur yang menghambat kemajuan dan perkembangan kapasitas potensial manusia seperti negara-birokratik, korporasi industrial, sistem perkotaan, elit profesional, sistem tekno-ilmiah, kompleks industri militer, dan sebagainya. Sekarang ini tampak bahwa kebanyakan negara sedang berkembang menuju ke arah sana, yang berarti cepat atau lambat akan terperangkap dalam jebakan “kekerasan pembangunan”. Sehubungan dengan itu, Hettne mengingatkan agar negara sedang berkembang mulai bangkit mengembangkan apa yang disebutnya “pemikiran pembangunan dari titik berlawanan” (*counterpoint development thinking*) untuk terbebas dari jebakan itu dan menuju pembangunan alternatif yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia.

Kapitalisme Global dan Kekerasan di NSB

Sejak tahun 1970-an, kebangkitan kembali ekonomi neo-liberal di dunia barat membawa perubahan baru dalam arah dan strategi pembangunan di negara sedang berkembang (NSB) untuk semakin jauh terlibat dalam model pembangunan kapitalisme. Lebih jauh pada tahun 1980-an, ekonomi neo-liberal mendapatkan kemenangannya yang luar biasa dengan ditandai oleh runtuhnya Uni Soviet dan komunisme Eropa Timur. Sejak itu ekspansi kapitalisme global tersebar kemanapun, hampir tidak ada hambatan berarti dari negara manapun. Sejak itu, negara-negara sedang berkembang semakin banyak mengadopsi model pembangunan ala neo-liberal sebagai model dan paradigma pembangunan untuk negeri mereka.

Bagian berikut ini akan didiskusikan penerapan model pembangunan neo-liberal sebagai model satu dimensi (*one-dimension model*), satu-satunya model yang dengan patuhnya diikuti NSB saat ini. Fokus kita pada aspek kekerasan pembangunan yang dibawa model ini dalam konteks nasional dan global. Perpanjangan tangan dan kepentingan kapitalisme global saat ini dapat dilihat dari kerja dua macam lembaga ekonominya yaitu korporasi perusahaan asing di NSB dan peran IMF dan Bank dunia dalam promosi dan tekanan ide mereka mempengaruhi pembangunan di NSB. Namun, karena keterbatasan data tentang kerja korporasi perusahaan asing, di sini hanya akan difokuskan

pada pengaruh IMF dan Bank Dunia dalam mempengaruhi kebijakan dan proses pengambilan keputusan pembangunan di NSB yang sering membawa ketidakstabilan sosial-politik di NSB.

IMF dan Bank Dunia merupakan dua lembaga ekonomi yang semula didisain dan mengklaim dirinya sebagai lembaga ekonomi murni, netral dari persoalan sosial-politik. Tujuan utama IMF dan Bank Dunia semula hanya untuk memberi bantuan hutang keuangan untuk rehabilitasi ekonomi pasca perang, pertama-tama untuk negara-negara Eropa Barat pada tahun 1950-an. Sesudah ekonomi negara-negara Eropa Barat terpulihkan, IMF dan Bank Dunia, yang dikenal pula dengan nama lembaga Bretton Woods itu, memperluas ekspansinya ke NSB. Hal itu terjadi pada tahun 1970-an, bertepatan dengan krisis keuangan negara barat dan bangkitnya kembali ekonomi neo-liberal di negara-negara maju. Meskipun IMF dan Bank Dunia saat itu hampir bangkrut, tetapi karena tingginya permintaan hutang NSB karena merosotnya harga minyak pada tahun 1974-1980, maka IMF dan Bank Dunia bangkit kembali memobilisasi dana untuk hutang ke NSB yang membutuhkan uang itu. Karena perkembangannya yang demikian sementara pengamat menyebutnya sebagai "moral hazard" bantuan IMF¹⁸. Bangkitnya ekonomi neo-liberal, yang dimotori oleh Reaganomics dan Thatcherism telah mendorong ekspansi IMF dan Bank Dunia begitu meluas ke pasar global. Misi utama mereka, menurut J. Sach, salah seorang ekonom Harvard yang juga *think thank* dibalik bekerjanya dua lembaga Bretton Wood itu, adalah untuk "konsolidasi mencapai terbentuknya pasar terbuka dalam ekonomi global"¹⁹.

Klaim IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga yang murni ekonomi dan netral dari masalah politik dalam prakteknya tidak benar. Keberadaan IMF dan Bank Dunia sendiri ternyata tidak bisa lepas dari keputusan yang bersifat politis. Hal itu dapat dilihat dari adanya tekanan dari dalam dan dari luar kedua lembaga ekonomi tersebut, yang mempengaruhi kebijakan keluar dari kedua lembaga tersebut terhadap NSB. Tekanan dari dalam datang dari anggota IMF dan Bank Dunia, terutama dari anggotanya yang besar yaitu Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang. Sebagai contoh, Amerika Serikat

¹⁸ Roland Vaubel, "The Moral Hazard of IMF Lending". *The World Economy*, Vol. 6, No. 3, 1983.

¹⁹ Seperti dikutip Dorothy van Soest, *the Global Crisis of Violence, Common Problems, Universal Causes, Shared Solution*. Washington DC: NASW Press, 1997.

memiliki kekuasaan besar untuk mengontrol melalui dua cara: dengan cara sistem voting dan pengangkatan direktur eksekutif IMF dan Bank Dunia secara langsung. Amerika Serikat mempunyai hak voting terbesar, sekitar 36 % di IMF dan 27 % di Bank Dunia, diikuti oleh negara-negara Eropa dan Jepang, sementara negara-negara sedang berkembang hanya memiliki hak voting sangat sedikit, meskipun akhir-akhir ini ada peningkatan. Tekanan dari luar, misalnya, dapat langsung datang dari negara-negara industri maju, khususnya Amerika-Eropa Barat-Jepang. Mereka, bahkan lewat telepon langsung dari kepala negaranya, dapat secara langsung mempengaruhi keputusan pejabat IMF dan Bank Dunia untuk memberi atau tidak memberi seberapa besar, kepada pengutang negara sedang berkembang²⁰.

Pinjaman IMF dan Bank Dunia secara garis besar diberikan dalam dua macam bentuk: pinjaman langsung atau tanpa syarat dan pinjaman dengan syarat. Keputusan yang demikian itu diambil sangat politis. Dua macam jenis pinjaman ini konsekuensinya menciptakan dua macam jenis tekanan politik: tekanan politik langsung dan tidak langsung²¹. Dari sini kita bisa melihat pengaruh politis dan keterlibatan IMF dan Bank Dunia dalam masalah politik di NSB. IMF seringkali tidak hanya memberi bantuan tetapi juga menekan NSB untuk mengadopsi kebijakannya, meskipun hal itu kontradiksi dengan kepentingan mayoritas warga negara NSB.

Melalui keterlibatan dalam mempengaruhi kebijakan NSB dari macam pinjaman yang diberikan ini IMF dan Bank Dunia secara langsung dan tidak langsung terlibat menyebabkan terjadinya kekerasan pembangunan di NSB. IMF dan Bank Dunia memberi kontribusi pada kekerasan pembangunan di NSB melalui dua cara: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung dapat terjadi melalui lima macam cara: (1) kebijakan untuk memberi pinjaman kepada pemerintah yang berada dalam perang sipil (pinjaman untuk perang sipil); (2) pemotongan atau penundaan pinjaman kepada pimpinan sayap kiri, sosialis dan nasionalis dan memberi pinjaman kepada pemimpin sayap kanan yang mendukung kapitalisme-liberal untuk menggeser pimpinan sayap kiri yang menolak kapitalisme-liberal; (3) memberi pinjaman yang

²⁰ Richard Swedberg, "the Doctrine of Economic Neutrality of IMF and the World Bank" *Journal of Peace Research*. Vol. 23, No. 4, 1986; K. Danehar, *50 Years is Enough: the Case Against the World Bank and the International Monetary Fund*. Boston: South End Press, 1994.

²¹ Swedberg, *op. cit.*, 1986.

berlawanan dengan resolusi PBB (pinjaman yang bertentangan dengan konvensi internasional); (4) memberi pinjaman yang menjadi isu politik tertentu untuk kampanye politik golongan tertentu di NSB; (5) kebijakan situasional IMF dan Bank Dunia untuk mengambil alih ekonomi suatu negara (*trustee-ship loans*)²². Salah satu contoh pinjaman perang sipil atau “dirty war” misalnya pinjaman yang diberikan kepada pemerintah Indochina tahun 1970-an, kepada pemerintah Argentina untuk perang Malvinas, dan pinjaman langsung yang diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung invansi Indonesia ke Timor Timur.

IMF dan Bank Dunia juga menciptakan kekerasan tidak langsung, yang justru lebih besar dibanding kekerasan tidak langsung. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan akibat dari kebijakan IMF dan Bank Dunia yang diberikan dan ditekan untuk diterapkan di NSB. Salah satu kebijakan yang sangat terkenal memberi kontribusi pada semakin berkembangnya kekerasan pembangunan di NSB adalah kebijakan program penyesuaian struktural (*structural adjustment programs/SAP*) dari IMF. Program ini semula didisain untuk memperlancar pembayaran hutang NSB, dengan cara, diantaranya, privatisasi perusahaan negara, mendorong ekspor, meliberalisasi perdagangan, deregulasi sektor swasta, pemotongan upah, pengurangan subsidi negara, pengurangan belanja pemerintah untuk pelayanan kesejahteraan sosial seperti kesehatan, pendidikan, subsidi pangan dan konsumen lainnya²³.

Dalam prakteknya kebijakan ini melampaui program semula, bahkan sering bertentangan dengan tujuan semula. Program-program ini sangat terkenal telah menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik, konflik kelas, konflik etnis, kerusuhan massa, bahkan mendorong perang sipil, seperti banyak terjadi di negara Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Keterlibatan IMF hingga memicu munculnya kerusuhan di NSB ini begitu nyata, sedemikian nyatanya sehingga di Amerika Latin, misalnya, sampai muncul istilah untuk menyebut kerusuhan itu sebagai “kerusuhan IMF “ (*IMF's riots*). Disebut demikian karena kerusuhan itu dipicu oleh kebijakan IMF²⁴. Lebih jauh lagi, program itu bahkan

²² *Ibid.*

²³ Dorothy van Soest, *op. cit.*, 1997

²⁴ J. Walton, “Urban Protest and the Global Political Economy: the IMF Riots” dalam M.P. Smith et.al (ed), *the Capitalist City*. Oxford: Basil Blackwell, 1987

juga bisa memicu terjadinya revolusi sosial seperti yang terjadi di Sudan pada peristiwa jatuhnya Jenderal Nameiri tahun 1985. Meskipun kita setuju bahwa konflik, kerusuhan massa, dan kekerasan sosial lainnya di NSB tidak hanya disebabkan program IMF, tetapi lebih kompleks dari itu, termasuk di dalamnya karena faktor nepotisme, korupsi, dan represi rejim yang berkuasa di NSB yang bersangkutan. Namun tidak bisa ditolak bahwa IMF dalam hal ini terlibat secara tidak langsung. Keterlibatan itu kebanyakan diperantarai oleh tidak mandiri atau ketergantungan rejim penguasa negara bersangkutan terhadap kebijakan IMF.

Kita menyaksikan keterlibatan IMF mendorong kekerasan yang demikian juga terjadi di Indonesia dalam peristiwa krisis ekonomi dan pergolakan sosial-politik reformasi tahun 1998. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurangi subsidi sembako dan minyak di tengah krisis ekonomi awal tahun 1998, misalnya, merupakan kebijakan atas saran IMF yang mendorong terjadinya protes sosial dan kerusuhan di berbagai daerah. Kebijakan itu diketahui telah memicu kerusuhan sosial di daerah pantai utara Jawa, Ende, Medan, dan sebagainya sekitar bulan Februari 1998.²⁵ Bahkan lebih jauh lagi bisa dikatakan bahwa kebijakan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia pada awal tahun 1998 merupakan kekuatan yang mendorong jatuhnya Soeharto, meskipun memang harus diakui hal itu juga di didorong dari dalam, oleh kerapuhan rejim Soeharto dan tekanan kekuatan revolusi damai “reformasi” bulan Mei 1998. Terjadinya kerusuhan dan revolusi “reformasi” Mei 1998 memang bukan semata-mata dipengaruhi oleh kebijakan IMF. Dalam diri rejim Soeharto sendiri juga timbul krisis politik-ekonomi yang serius ketika kebijakan IMF ditekankan untuk diambil pemerintah Indonesia. Hal itu terjadi, misalnya, dalam kasus restrukturisasi perbankan, yang menyebabkan Soeharto memecat gubernur Bank Indonesia dan terus menerus konflik dan melakukan tawar menawar dengan IMF sehingga selama hampir tiga bulan tidak membuahkan kebijakan berarti untuk mengatasi krisis²⁶. Tetapi, ibarat dua gajah bertarung rumput terinjak jadi korban, konflik antara rejim Soeharto yang menolak kebijakan IMF karena membahayakan

²⁵ *Kompas*, 16 Januari, 18 Januari, 3, Februari, 18 Februari 1998; *D&R*, 21 Februari 1998;

²⁶ Colin Johnson, “Survey of Recent Development”. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 34, No 2, 1998; David C. Cole and Betty F. Slade, “Why has Indonesia’s Financial Crisis Been So Bad?” *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 34, No. 2, 1998.

kekuasaannya dan IMF yang memaksakan kebijakan pada pemerintah Indonesia, pada akhirnya membawa korban kekerasan yang sangat besar pada masyarakat Indonesia.

Kekerasan tidak langsung lainnya yang disebabkan oleh kebijakan SAP dari IMF adalah semakin meningkatnya hutang NSB, ketergantungan NSB terhadap negara kaya, represi, kemiskinan, kelaparan, dan kehancuran lingkungan hidup di NSB. Meskipun semula program ini didisain untuk memperlancar pembayaran hutang luar negeri NSB, tetapi pada kenyataannya hutang NSB justru sesudah itu semakin meningkat pesat. Di Afrika, misalnya, pada tahun 1992 sesudah SAP diterapkan justru hutang negara-negara Afrika meningkat sekitar dua setengah kali lebih besar²⁷. Salah satu penyebabnya adalah sesudah SAP diterapkan justru muncul ketidakstabilan sosial-politik dan perang antar suku, sehingga mendorong negara-negara Afrika semakin banyak membeli persenjataan militer dari negara barat. Anehnya, meskipun terjadi kecenderungan demikian, IMF dan Bank Dunia sama sekali tidak mempersoalkan kecenderungan yang bertentangan dengan tujuan semula kebijakan SAP itu²⁸.

Kecenderungan demikian menjadikan NSB cenderung terjebak dalam hutang dan semakin tergantung pada negara kaya. Keterjebakan dalam hutang ini selanjutnya mendorong rejim NSP semakin represif karena ketidakstabilan sosial-politik yang timbul. Pada akhirnya, yang menjadi korban paling banyak dari semua itu adalah rakyat NSB yang harus menanggung hutang dan terjebak dalam kemiskinan. Sungguh ironis bahwa sesudah SAP diterapkan, NSB justru terjebak dalam hutang, kemiskinan dan konflik kekerasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa SAP menciptakan lingkaran kekerasan. NSB semakin tergantung pada negara kaya, sebaliknya negara kaya menjadi penguasa dan mengontrol sepenuhnya tatanan ekonomi dunia. Karena kecenderungan demikian itu maka tidak heran bila banyak orang melihat apa yang berlangsung sekarang ini adalah munculnya kembali kolonialisme bentuk baru atau neo-kolonialisme akibat dari imperialisme kapitalisme global yang merajai dunia sekarang ini.

²⁷ Dorothy van Soest, *op. cit.*, 1997.

²⁸ J. 'Bayo Adekanye, "Structural Adjustment, Democratization and Rising Ethnic Tensions in Africa" *Development and Change*, Vol 26, 1995.

Menuju Pembangunan Perspektif HAM

Telah didiskusikan di muka, dua model arus utama pembangunan, model kapitalis dan model sosialis sama-sama gagal menjawab tantangan memecahkan permasalahan keterbelakangan NSB, dan sebaliknya justru menyebabkan berseminya kekerasan pembangunan dan semakin tergantungnya NSB pada negara kaya. Setelah melakukan refleksi atas kekerasan pembangunan yang terjadi di dunia sekitar kita sekarang, selanjutnya kita perlu berfikir secara normatif untuk mencari alternatif pemecahan persoalan di atas, paling tidak untuk mengurangi kekerasan pembangunan dan memotong ketergantungan NSB pada negara kaya. Cara berfikir normatif yang demikian bukan suatu hal baru. Dalam wacana pembangunan selama ini ada, kita mengenal cara berfikir yang positivis dan yang normatif. Kita memakai cara berfikir terakhir dengan tujuan bukan semata-mata menjelaskan, tetapi juga emansipatif, mengubah keadaan yang ada. Cara berfikir terakhir umumnya banyak dimiliki oleh pemikir pembangunan alternatif.

Alternatif yang diajukan adalah pembangunan alternatif yang cocok untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yang damai, atau bebas dari rasa takut dan kekerasan. Upaya ini pertamanya akan lebih tepat bila dimulai dengan upaya merekonsiliasi kontradiksi-kontradiksi di dalam konsep pembangunan Galtung, sebagaimana kritisi Sorensen di muka. Dalam hal ini, penting untuk mencari alternatif model pembangunan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesejahteraan sosial-ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*), rasa aman (*security*), dan identitas (*identity*), untuk terbebas dari empat macam kekerasan akut; kemiskinan (*poverty*), represi (*repression*), pengrusakan (*destruction*), dan alienasi (*alienation*). Namun, seperti dikritik Sorensen, pencapaian itu tidak menimbulkan benturan satu sama lain yang justru dapat menimbulkan kekerasan baru, yaitu apa yang disebut dengan “kekerasan pembangunan”.

Untuk rekonsiliasi kontradiksi-kontraiksi tersebut, menarik untuk disimak tentang model pembangunan alternatif yang berpijak pada prinsip HAM, sebagaimana dikemukakan Jamil Salmi²⁹. Setelah melakukan refleksi kritis terhadap model pembangunan arus utama kapitalis dan sosialis yang didalamnya penuh membawa akibat terjadinya kekerasan, Jamil Salmi sampai

²⁹ Salmi, *op. cit.*, 1993.

pada kesimpulan bahwa pembangunan haruslah berdasarkan prinsip HAM untuk terhindar dari paradoks kekerasan itu. Alasannya, karena kekerasan itu sendiri pada esensinya merupakan pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia untuk terpenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini pemenuhan kebutuhan dasar manusia bukan semata pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi melekat di dalamnya adalah hak-hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi pemenuhannya oleh negara, pemerintah, dan kebijakan politik, sebagai hak warga negara. Dengan kata lain, secara singkat dapat dikatakan bahwa pembangunan yang membebaskan anggota masyarakat dari kekerasan haruslah berpijak pada HAM, karena pembangunan yang mengingkari pemenuhan HAM itu sendiri merupakan sumber dari terjadinya kekerasan di masyarakat.

Pembangunan berpijak pada prinsip HAM di sini adalah pembangunan perspektif HAM, yaitu pembangunan yang dalam cara pandanginya menjadikan prinsip HAM sebagai dasar utama, yakni prinsip-prinsip nilai yang terkandung di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (*the Declaration of Universal Human Right*) sebagaimana dikeluarkan oleh PBB, 10 Desember, 1948. Dari sudut ini, pemenuhan empat kebutuhan dasar yang dikemukakan Galtung di muka pada dasarnya termasuk di dalamnya. Menurut deklarasi itu, pemenuhan kebutuhan dasar manusia haruslah terpenuhi bagi setiap orang di dunia, tanpa pandang bulu apa warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, afiliasi politik, bahasa, dan status-status lainnya³⁰.

Namun, perlu dikemukakan beberapa catatan disini dalam rangka pengembangan dan penyusunan disain model pembangunan perspektif HAM, mengingat masih adanya perbedaan persepsi di antara berbagai orang dari latar belakang nilai kultural berbeda terhadap prinsip universal HAM itu. *Pertama*, hak asasi manusia tidak dapat dipisah-pisah atau didiferensiasikan secara hirarkis. Ini untuk menjawab sementara pendapat yang mengatakan bahwa ada tingkatan-tingkatan hak asasi manusia, ada yang primer dan sekunder. Menurut Salmi, tindakan diferensiasi terhadap HAM dapat membawa konsekuensi pengukuhan struktur hirarkis kekuasaan yang ada untuk melanggengkan perbedaan pemenuhan HAM untuk pengukuhan hak istimewa mereka. Sebagaimana kekuasaan cenderung hirarkis dalam

³⁰ Michael Palumbo, *Human Right: Meaning and History*. Florida: Krieger Publishing Company, 1982

masyarakat kapitalis, pemenuhan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia di dalamnya pun cenderung hirarkis; sang elit seringkali dijamin sementara lapisan kelas bawah diabaikan. Sebagai contoh, hak majikan dan pekerja untuk terlindungi dan bebas dari kecelakaan kerja seringkali terancam oleh adanya hak istimewa majikan yang bebas mengatur dan mengontrol aktivitas produksi yang mereka pandang produktif dan sesuai dengan kepentingan mereka. Selain itu, pengertian HAM dari sudut pandang kapitalis seringkali merancukan antara pengertian kebutuhan dasar dengan kemampuan daya beli. Pandangan umum bahwa ada hirarki antara kebutuhan fisik untuk survive, kebutuhan psikis, kebutuhan sosial, kebutuhan budaya, dan kebutuhan subjektif orang per orang, merupakan hirarki yang sedikit banyak dikaitkan dengan kemampuan daya beli orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut³¹.

Untuk menghindari masalah ini, Salmi mengusulkan bahwa lingkup penerapan prinsip HAM dapat didefinisikan lebih tepat dengan memperhitungkan sifat standar mendua dari HAM yang bergantung pada lingkungan sosialnya, yaitu antara HAM bersifat dasar (*fundamental rights*) dan HAM sesuai dengan kondisi (*conditional rights*). Jenis HAM yang pertama memiliki sifat mengikat tanpa syarat, harus dipenuhi untuk siapapun, karena hal itu berkaitan dengan kebutuhan hidup utama yang tidak bisa ditawar-tawar. Termasuk di sini adalah perlindungan untuk melawan dan terhindar dari semua bentuk kekerasan langsung dan tidak langsung, seperti pembunuhan, penyiksaan, kesakitan, kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Sementara, HAM kondisional memiliki nilai yang relatif. Lingkupnya meliputi pemenuhan kebutuhan dasar atau HAM sepanjang hal itu tidak mengganggu HAM orang lain.

Perbedaan macam HAM yang terakhir ini dengan HAM yang pertama dapat dijelaskan, misalnya, dengan analogi hak orang untuk mengemudi dan keharusan orang untuk punya SIM (surat ijin mengemudi). Secara teoritik, setiap orang punya hak untuk mengemudi, sudah seharusnya tidak ada diskriminasi gender, ras, dan kriteria sosial lainnya yang mencegah orang untuk menikmati dan mengklaim hak mereka untuk mengemudi. Namun, semua pengemudi diharuskan mematuhi peraturan untuk melindungi orang lain dari bahaya kecelakaan, yaitu salah satunya dengan keharusan memiliki SIM.

³¹ Salmi, *op. cit.*, 1993.

Pemilikan SIM di sini diatur untuk melindungi hak hidup dan menggunakan jalan dari orang lain. Jadi, di dalam macam HAM yang kedua terkandung di dalamnya hak dan kewajiban. Seperti pula halnya dalam hal kebebasan untuk mengemukakan pendapat, protes, dan demonstrasi. Tidak bisa disangkal bahwa kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap orang, tetapi hal itu tidak boleh dinikmati dengan mengorbankan kebebasan orang lain untuk mengemukakan pendapat atau merampas kehormatan orang lain.

Kedua, HAM tidak bisa dikompromikan, terutama HAM yang bersifat fundamental. HAM harus diterapkan secara universal, dengan mengesampingkan partikularisme yang ada. Ini penting karena kapitalisme global yang berdasar pada kepentingan material itu seringkali mendorong orang menerapkan HAM secara standar ganda. Banyak kasus menunjukkan bahwa negara, khususnya negara kapitalisme maju seperti Amerika Serikat, memiliki standar ganda dalam isu HAM. Negara kapitalis-demokrasi barat seperti Amerika Serikat biasanya membela isu HAM suatu negara hanya ketika strategi atau kepentingan politik ekonomi mereka terganggu. Dalam hal ini HAM dikompromikan dengan kepentingan mereka. Konflik kepentingan demikian tentu saja akan menghambat pemenuhan HAM suatu kelompok masyarakat atau negara. Dalam hal ini, adalah penting mengingat apa yang dikatakan Kelly bahwa "HAM bersifat tidak bisa dibagi-bagi (*indivisible*). Setiap pelanggaran dimanapun adalah tanggungjawab setiap orang"³². Model pembangunan perspektif HAM sangat penting mempertimbangkan prinsip universalitas demikian. Hak setiap orang untuk terbebas dari segala macam jenis kekerasan, langsung maupun tidak langsung, yang melekat dalam model pembangunan perspektif HAM harus tidak dikompromikan dengan kepentingan politik.

Akhirnya, HAM pada dasarnya tidak bisa dipisah-pisah (*unseparated*), antara HAM yang satu dengan HAM lainnya. Sekarang ini terdapat kecenderungan bahwa aspek HAM cenderung dipecah-pecah ke dalam aspek-aspek yang kecil, seperti HAM ekonomi, HAM sosial, HAM politik, dan HAM kultural. Pemisahan demikian, selain tidak berguna juga dibalik itu tersembunyi kecenderungan melanggar HAM itu sendiri, hanya memenuhi

³² Petra K. Kelly, *Thinking Green. Essays on Environmentalism, Feminism, and Nonviolence*. Berkely: Parallax Press, 1994.

HAM satu tetapi tidak mengabaikan HAM lainnya. Dalam kenyataannya, aspek-aspek HAM itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena semuanya menentukan integritas dan harga diri manusia secara integral.

Semua prinsip di atas harus diperhitungkan dalam pengembangan model pembangunan perspektif HAM yang memiliki ciri bahwa pembangunan haruslah membebaskan manusia dari semua jenis kekerasan. Ini sekaligus merupakan kritik atas apa yang berlangsung selama ini bahwa model pembangunan arus utama kurang memiliki kapasitas untuk merekonsiliasi konflik-konflik yang berlangsung antara aspek ekonomi, politik, dan sosial. Sejak lama praktek pembangunan ekonomi, baik di negara kaya maju maupun di NSB, dalam konflik terus menerus dengan hak-hak sipil politik dan sosial warga masyarakat yang semestinya harus didahulukan. Pendekatan HAM untuk pembangunan akan membawa semua itu, aspek ekonomi, politik, dan sosial, bersama-sama dalam pembangunan integral untuk perdamaian. Sebagaimana pernah dikemukakan tokoh perdamaian abad 20, Aung San Suu Kyi, dalam perspektif perdamaian, tidak ada lagi pemisahan antara demokrasi (aspek politik), keadilan (aspek sosial), dan kesejahteraan (aspek ekonomi) dalam praktek pembangunan. "Pembangunan yang sesungguhnya mencakup tidak hanya pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Dalam arti sesungguhnya pembangunan haruslah memiliki kemampuan pemberdayaan (*empowerment*) manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasinya sebagai manusia", demikian Suu Kyi menegaskan³³. Untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kekerasan menuju masyarakat damai sejahtera, sebagaimana dicitakan oleh pembangunan perspektif HAM, makna pengertian pembangunan demikian itu harus menjadi dasar penghayatan bersama.

³³ Aung San Suu Kyi, "Freedom, Development, and Human Worth". *Journal of Democracy*. Vol. 6, No. 2, 1995.

Daftar Pustaka

- Adekanye, J. 'Bayo, "Structural Adjustment, Democratization, and Rising Ethnic Tensions in Afrika". *Development and Change*, Vol. 26, 1995.
- Bienen, Henry S and Mark Gersovitz, "Consumer Subsidy Cut, Violence, and Political Stability". *Comparative Politics*. Vol, 19, No.1, 1986.
- Brohman, John, "Economism and Critical Silence in Development Studies: a Theoretical Critique of Neo-liberalism". *Third World Quarterly*, Vol. 16, No. 2, 1995.
- Danekar, K., *50 Years is Enough: the Case against the World Bank and the International Monetary Fund*. Boston: South and Press, 1994.
- Galtung, Johan, "Violence, Peace, and Peace Research". Dalam Johan Galtung, *Essays in Peace Research*, Vol I. Copenghagen: Christian Ejlens, 1975.
- , "Why the Concern with Ways of Life". GDIP Project, United Nations University, printed in the Western Development Model and Life Style. Council for International Development Studies, Oslo. 1980.
- , "Twenty-Five Years of Peace Research: Ten Challenge and Some Responses". *Journal of Peace Research*, Vol, 22. No, 2. 1985.
- , "Cultural Violence". *Journal of Peace Research*. Vol. 27, No. 3, 1990.
- Hettne, Bjorn, "Peace and Development: Contradictions and Compatibilities". *Journal of Peace Research*. Vol. 20, No. 4, 1983.
- Kelly, Petra K. (1994), *Thinking Green. Essays on Environmentalism, Feminism, and Nonviolence*. Berkeley: Parallax Press, 1994.
- Palumbo, Michael, *Human Rights: Meaning and History*. Florida: Kreiger Publishing Company, 1982.
- Salmi, Jamil, *Violence & Democratic Society: New Approachs to Human Right*. London: Zed Books, 1993.
- Sorensen, Gerog, "Utopianism in Peace Research: the Gandhian Heritage". *Journal of Peace Research*. Vol, 29, No. 2. 1992.

- , “Contradictions in a Rich Concept of Development. Problems of Welfare and the Quality of Life”. *Bulletin of Peace Proposals*, Vol 18, No 1, 1987.
- Suu Kyi, Aung San, “Freedom, Development, and Human Worth”. *Journal of Democracy*. Vol. 6, No.2, 1995.
- Swedberg, Richard, “the Doctrine of Economic Neutrality of IMF and the World Bank”. *Journal of Peace Research*, Vol. 23, No. 4, 1986.
- Van Soest, Dorothy, *The Global Crisis of Violence: Common Problems, Universal Causes, Shared Solution*. Washington DC: NASW Press, 1997.
- Vaubel, Roland, “the Moral Hazard of IMF Lending”. *The World Economy*. Vol. 6, No. 3. 1983.
- Walton, J., “Urban Protest and the Global Political Economy: the IMF Riots”, dalam M.P. Smith and J.R. Feagin (ed), *The Capitalist City* Oxford :Basil Backwell, 1994.
- Wheelwright, Ted, “Economic Control for Social Ends”, dalam Stuart Rees, Gordon Rodley, Frank Stilwell (ed), *Beyond the Market. Alternatives to Economic Rationalism*. Sydney: Pluto Press, 1994.